TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI ATAS KASUS *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN *TRACK RECORD* DATA VMS (*VESSEL MONITORING SYSTEM*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRAK

Rr. Novaryana Laras Dewi Prasasti

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa. Namun, selama ini kekayaan laut tersebut belum dikelola secara baik, sehingga hasil laut belum banyak ikut membantu mensejahterakan rakyat. Praktek *illegal fishing* adalah kejahatan terorganisir lintas nasional, telah banyak kerugian bagi Indonesia. Berbagai upaya telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka penangkapan *illegal fishing*, dengan penambahan sarana dan prasarana pengendalian upaya kerjasama dengan berbagai penegak hukum terkait, seperti TNI AL, Polisi dan Peradilan. Untuk itulah diperlukan langkah-langkah untuk memfungsikan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan guna menanggulangi penangkapan ikan *illegal* yang terjadi. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan upaya pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem *monitoring*, *controlling*, *and surveilance*, yang terdiri dari pemasangan transmitter dalam rangka pengembangan *vessel monitoring system.* Dengan adanya *vessel monitoring system* dapat diakomodasi untuk kasus *illegal fishing*. Oleh karena itu timbul beberapa masalah antara lain Bagaimana Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan serta Bagaimana kewenangan mengadili Pengadilan Perikanan atas kasus *Illegal Fishing* yang menggunakan *track record* data VMS (*Vessel Monitoring System*) sebagai alat bukti.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan untuk mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *track record* data VMS merupakan salah satu teknologi yang diupayakan sebagai pencegahan dalam perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan negara Indonesia, dimana dengan adanya VMS yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Track record* data VMS dapat digunakan sebagai dasar menentukan kewenangan mengadili suatu kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia. Mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Perikanan kasus *illegal fishing* dapat didasarkan pada *track record* data VMS dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana *track* tersebut berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.